

BAB 2

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DAN PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL

Guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini menggunakan beberapa konsep ataupun teori untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mempermudah proses analisis data yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini di antaranya adalah konsep mengenai pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, *microfinance*, modal sosial, dan *motherhood spirit*. Pada konsep pemberdayaan, baik pemberdayaan secara umum maupun konsep pemberdayaan perempuan akan dibahas mengenai pengertian pemberdayaan hingga tahap-tahap pemberdayaan. Konsep *microfinance* akan membahas pengertian *microfinance* serta perkembangannya dalam konteks kekinian. Konsep modal sosial merupakan salah satu konsep utama yang akan mendukung analisis penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur kepercayaan, jaringan, dan norma dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. sementara konsep *motherhood spirit* merupakan sebuah konsep baru yang berguna selain untuk memperluas khasanah pengetahuan, melainkan pula mendukung dalam analisis data. Konsep ini membahas mengenai pengertian *motherhood spirit* serta sejarah perkembangannya. Berikut merupakan beberapa konsep yang dibahas pada bab ini.

2.1. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, maka kita akan memperoleh gambaran yang sangat luas mengenai konsep ini. Ketika kita membicarakan kesejahteraan, maka tidak hanya satu aspek saja yang diperhatikan seperti aspek ekonomi, melainkan pula aspek-aspek lainnya yang saling mendukung seperti aspek sosial, budaya, lingkungan, dan spiritual. Oleh karena itu, pengertian kesejahteraan sosial diartikan sangat luas oleh berbagai pakar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Midgley (dalam Adi, 2005: 16) bahwa kesejahteraan sosial

merupakan *"a state or condition of human well-being that exists when social problem are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized"* (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan).

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut Friedlander (1980) dalam Adi (2003: 45) merupakan *"...the organized system of social services and institutions. Designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health"* (Sebuah sistem yang terorganisasi dari beragam institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu maupun kelompok dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memaksimalkan kesempatan sosial di mana kondisi tersebut dapat dirancang baik oleh individu maupun institusi yang nantinya dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, individu maupun institusi melakukan intervensi baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu intervensi yang dilakukan dan telah menjadi salah satu *icon* dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi adalah pemberdayaan.

Istilah pemberdayaan memiliki arti yang berbeda dalam konteks politik dan sosiokultural yang berbeda pula. Istilah ini meliputi kekuatan dari dalam diri, kontrol, kekuasaan, kepercayaan diri, pilihan, martabat hidup terkait dengan nilai-nilai, kemampuan untuk memperjuangkan hak, kemandirian, pengambilan keputusan secara mandiri, bebas, terbangun, dan kapabilitas (Narayan, 2002: 10). Pengertian ini melekat pada nilai-nilai lokal dan sistem kepercayaan.

Pemberdayaan sebagai sebuah intervensi merupakan suatu upaya untuk memperkuat aset masyarakat berdasarkan lembaga, dan mengubah peraturan institusional yang mengatur perilaku dan interaksi antarmanusia. Meningkatkan akses – seperti informasi atau kredit – dapat mengembangkan keberdayaan suatu

masyarakat. Perubahan institusional dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan seperangkat hak dan kewajiban yang baru, merubah sanksi dan insentif, dan mengurangi biaya ekonomi dan sosial dalam mengekspresikan pilihan – yaitu, dapat menciptakan kesetaraan dalam meraih kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung (World Bank, 2005 dalam Alsop dkk, 2006: 12).

Dalam arti yang lebih luas, pemberdayaan merupakan perluasan dari kebebasan untuk memilih dan bertindak. Ini dapat diartikan meningkatkan otoritas dan kontrol seseorang yang memiliki sumber daya yang terbatas. Keterbatasan ini dapat terjadi akibat kurangnya aset yang dimiliki ataupun ketidakmampuan untuk bernegosiasi guna meningkatkan “kemampuan” mereka dengan institusi formal ataupun informal. Dalam hal ini, ketidakberdayaan melekat pada hubungan institusional. Berdasarkan hal tersebut, maka Narayan (2002) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut. *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.”* (Pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan kaum miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, mempengaruhi, memiliki kontrol, dan memiliki institusi yang akuntabel yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka).

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Menurut Ife (1995: 61-64), pengertian kekuasaan tidak berhenti pada kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan seseorang atas beberapa hal berikut.

- Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

- Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Pendapat Ife ini sejalan dengan Kabeer (2001: 19) yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Lebih lanjut menurut Kabeer, pilihan di sini dapat diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk memilih hal lain –alternatif- adapun pengertian pemberdayaan di sini adalah sebagai berikut. *“Empowerment thus refers to the expansion in people’s ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them.”* (Pemberdayaan merujuk pada ekspansi kemampuan seseorang untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya tidak diakui).

Dalam kegiatan pemberdayaan prinsip *“Self-Determination”* (Bistek, dalam Adi 2002: 162) merupakan suatu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial. Gagasan ini dapat diartikan sebagai dorongan yang diberikan kepada komunitas sasaran untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Secara lebih lanjut, gagasan ini bertujuan agar komunitas sasaran (klien) memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya (Adi 2002: 163)

Berdasarkan beberapa konsep di atas, dalam penelitian ini, pengertian pemberdayaan dibatasi pada kemampuan komunitas sasaran untuk berdaya secara mandiri dan partisipatif yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.1. Aspek Pemberdayaan

Dalam pelaksanaannya, Narayan (2002: 18) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut.

a. Akses terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, puisi, cerita, debat, teater jalanan, dan opera jalanan –dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural- dan biasanya menggunakan media seperti radio, televisi, dan internet.

b. Inklusi dan partisipasi

Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa: siapa yang terlibat? Bennet (2002, dalam Malholtra, 2002: 5) mengungkapkan bahwa pengertian inklusi sosial sebagai berikut. *“The removal of institutional barriers and the enhancement of incentives to increase the access of diverse individuals and groups to assets and development opportunities.”* (Pengurangan hambatan institusional dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembangan).

Lebih lanjut Bennet menekankan bahwa pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. Proses pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi sosial membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai “dari atas.” Sementara partisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan.

Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat suatu perubahan – yang merupakan hakekat dari pemberdayaan -

Usaha untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi membutuhkan perubahan peraturan agar masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara langsung dalam penentuan kebijakan lokal dan nasional, penyusunan anggaran, dan pemberian pelayanan dasar. Dalam hal ini, kita dapat melihat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung mereka menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.

Conyers (1991: 86-187) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, di antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting dan apa yang tidak penting oleh suatu komunitas.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan yang, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. terdapat tiga tipe mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme politik, administratif, dan publik. Akuntabilitas politik terjadi melalui partai politik dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Akuntabilitas administratif dapat terjadi melalui mekanisme akuntabilitas internal lembaga pemerintah. Sementara mekanisme akuntabilitas sosial merupakan suatu

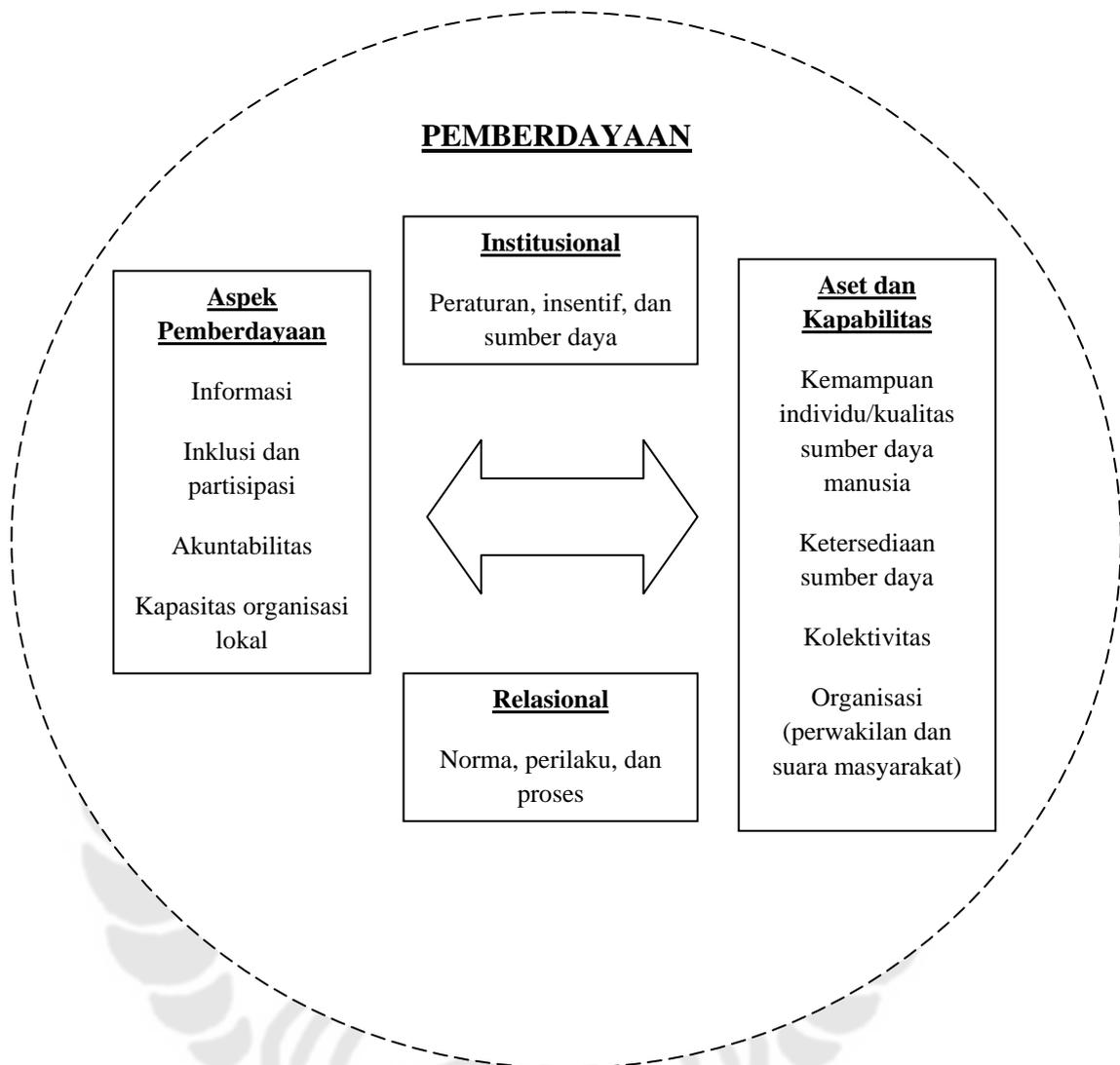
upaya pemerintah untuk dapat akuntabel bagi warganya. Akuntabilitas sosial dapat mendorong mekanisme akuntabilitas politik dan administratif.

d. Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan sistem formal, perempuan miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya kelompok wanita yang saling meminjam uang atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat berbentuk formal, dengan atau tanpa registrasi yang sah, contohnya kelompok tani atau kelompok lingkungan ketetanggaan.

Suara dan permintaan masyarakat yang terorganisasi umumnya lebih didengarkan dari pada masyarakat yang tidak terorganisir. Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya, namun mereka terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas. Seringkali mereka kurang memiliki modal sosial yang menjembatani dan menghubungkan (*bridging and linking social capital*), yaitu mereka tidak dapat terhubung dengan kelompok lain atau sumber daya lainnya.

Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. Organisasi, asosiasi, federasi, jaringan, dan gerakan sosial kelompok miskin merupakan pemain kunci dalam tataran institusional.



Gambar 2.1 Kerangka Pemberdayaan

Sumber: Telah diolah kembali dari Narayan (2002)

Berdasarkan diagram di atas, aspek pemberdayaan serta aset dan kapabilitas saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Di sini dapat terlihat bahwa suatu pemberdayaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, kolektivitas, dan organisasi (perwakilan masyarakat). Aset dan kapabilitas ini saling bersinergi dengan aspek pemberdayaan (informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal). Modal sosial juga di

sini berperan sebagai penghubung dan aspek yang turut mempengaruhi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Modal sosial ini ada yang bersifat institusional yang terwujud dalam peraturan dan sumber daya, serta ada yang bersifat relasional terwujud dalam bentuk norma, perilaku, dan sumber daya.

Lebih lanjut Narayan mengungkapkan bahwa kaum miskin tidak akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka tidak dihargai dan tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat, hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap pemerintahan lokal, sektor ekonomi swasta, dan kurangnya akses terhadap informasi.

2.1.2. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003: 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 1).

a. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

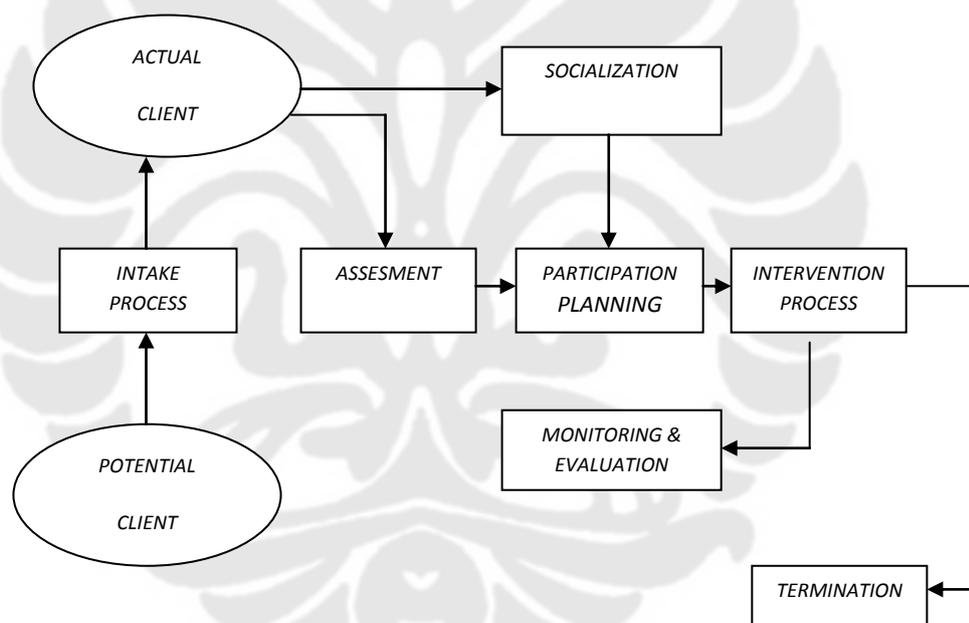
b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Tahapan program pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas, tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Tahap-tahap Pemberdayaan

Sumber : Lubis, 2008

Berdasarkan gambar di atas, tahap-tahap pemberdayaan dibagi ke dalam tujuh tahap. Yaitu tahap persiapan (*intake process*), *assesment*, perencanaan partisipasi, proses intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Pada tahap *intake*, terdapat dua sasaran yang dituju yaitu klien aktual dan klien potensial. Klien aktual merujuk pada klien yang akan diintervensi, sementara klien potensial

adalah klien yang memiliki potensi untuk diintervensi. Kedua klien tersebut memperoleh sosialisasi dan melalui tahap *assesment* untuk kemudian direncanakan sebuah rencana aksi untuk kegiatan pendampingan. Dalam setiap tahap, terutama tahap pendampingan, monitoring dan evaluasi diperlukan. Kemudian akhirnya tahap terminasi atau pelepasan merupakan tahap terakhir dari proses pemberdayaan di mana komunitas sasaran telah mampu mandiri dan berdaya. Berikut merupakan tahap-tahap pemberdayaan.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (*community worker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2. Tahap Pengkajian (*assessment*)

Proses *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = *felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini, agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap *capacity building* dan *networking*

Tahapan ini mencakup:

- Melakukan pelatihan, *workshop*, atau sejenisnya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.
- Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya.
- Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan

Tahapan ini mencakup:

- Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat sasaran.

6. Tahap evaluasi

Tahapan ini mencakup:

- Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dijalankan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (*phasing out strategy*).

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.

2.1.3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan memang berkaitan erat dengan pilihan, kontrol, dan kekuasaan seseorang. Terkait dengan pemberdayaan perempuan, maka pemberdayaan merupakan kemampuan untuk membuat suatu keputusan dan memengaruhi hasil yang berguna bagi diri mereka sendiri dan keluarga (Malholtra, 2002). Beberapa ahli mengungkapkan pengertian pemberdayaan perempuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Definisi Pemberdayaan Perempuan

No	Definisi Pemberdayaan	Tokoh
1.	<p><i>“Empowerment is about change, choice, and power. It is a process of change by which individuals or groups with little or no power gain the power and ability to make choices that affect their lives. The structures of power—who has it, what its sources are, and how it is exercised—directly affect the choices that women are able to make in their lives.”</i></p> <p>(Pemberdayaan merupakan perubahan, pilihan, dan kekuasaan. Ini merupakan sebuah proses perubahan di mana individu atau kelompok dengan sedikit atau tanpa kekuasaan memperoleh kekuasaan dan kemampuan untuk membuat pilihan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Struktur kekuasaan –yang memilikinya, sumber daya apa, dan bagaimana memanfaatkannya—secara langsung memengaruhi pilihan perempuan untuk dapat memanfaatkannya dalam kehidupan mereka)</p>	Linda Mayoux, 2001b: 18
2.	<p><i>“Empowerment as altering relations of power...which constrain women’s options and autonomy and adversely affect health and well-being.”</i></p> <p>(Pemberdayaan merupakan merupakan upaya untuk mengubah hubungan kekuasaan ... yang memaksa pilihan perempuan dan otonomi dan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan)</p>	Gita Sen (1993) dalam Malholtra (2002: 6)

Pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas memiliki suatu benang merah, yaitu bahwa manusia memiliki kekuasaan dan pilihan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Adalah benar pemberdayaan memiliki tujuan yang utama dan mulia yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun perlu diingat, pemberdayaan adalah suatu proses, didasarkan pada prinsip kemampuan diri sendiri, dan tidak dapat dipaksakan. Pemberdayaan yang tidak memperhatikan aspek-aspek *self determination* hanya akan menghasilkan pemberdayaan semu.

2.1.3.1. Ide Pengarusutamaan, Kesetaraan, dan Keadilan Gender Dalam Pemberdayaan Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri pemiskinan terhadap perempuan oleh ideologi gender patriarki memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang tidak beruntung dan kerap mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermula dari konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan. Mayoux (2005a: 3) mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut. “*Making women’s concerns and experiences integral to the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres.*” (Mayoux, 2005a: 3)

Di sini kita dapat melihat bahwa pengarusutamaan gender merupakan upaya integral yang dilakukan agar perempuan memahami dan turut serta dalam proses desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi setiap kebijakan yang dibuat dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Ide dasarnya adalah agar perempuan dapat menyuarakan hak-hak dan aspirasinya dalam setiap lini kehidupan. Perempuan disini berperan tidak hanya sebagai objek, pengamat semata, melainkan pula sebagai subjek dalam setiap kegiatan pembangunan. Ini sejalan dengan pendapat Sen (1999) yang mengungkapkan bahwa perempuan sebagai *agent of change* memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Lebih lanjut Mayoux mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi di mana perempuan memperoleh keadilan dan kesempatan yang sama, dan gender tidak lagi menjadi dasar diskriminasi dan ketidakadilan di antara masyarakat.

World Bank (2001) mendefinisikan kesetaraan gender sebagai istilah untuk kesetaraan mendapatkan perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan atas bonus kerja dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya yang menyediakan kesempatan), dan kesetaraan untuk bersuara (kemampuan untuk mempengaruhi dan

berkontribusi terhadap proses pembangunan). Kesetaraan gender menunjukkan “kesetaraan dalam tujuan hidup bagi perempuan dan laki-laki, mengenai kebutuhan dan minat yang berbeda, dan memerlukan redistribusi kekuasaan dan sumber daya.”

Sementara keadilan gender adalah “mengetahui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, preferensi, dan minat yang berbeda, dan bahwa kesetaraan atas hasil mengharuskan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Reeves and Baden, 2000: 10).

Dalam masyarakat yang setara gender, baik perempuan dan laki-laki memiliki dan menikmati hak, status, tanggung jawab, serta akses terhadap kekuasaan dan sumber daya yang setara. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki akses terhadap informasi dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Ini merupakan inti sari dari pemberdayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari pengarusutamaan gender adalah kesetaraan gender melalui kegiatan pemberdayaan meliputi beberapa hal berikut.

- a. Memprioritaskan pemberdayaan perempuan karena diskriminasi terbesar yang pernah terjadi di dunia adalah terhadap perempuan.
- b. Tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, melainkan pula meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik perempuan.
- c. Menghubungkan proses partisipasi masyarakat tingkat akar rumput dengan kegiatan advokasi dan lobi terhadap institusi level makro.

2.1.3.2. Unsur-Unsur Pemberdayaan Perempuan

Senada dengan Kabeer (2001), Longwe (1989, 1991 dalam Mayoux, 2005a) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut.

1. *Welfare* (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang

tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama berikut (Claros and Zahidi, 2005: 2-5).

Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

Sementara *pencapaian pendidikan* merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik. *Kesehatan dan kesejahteraan* merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

Amartya Sen (1999, dalam Claros and Zahidi, 2005: 2) menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.

2. *Access* (Akses)

Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan

teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

3. *Consientisation* (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

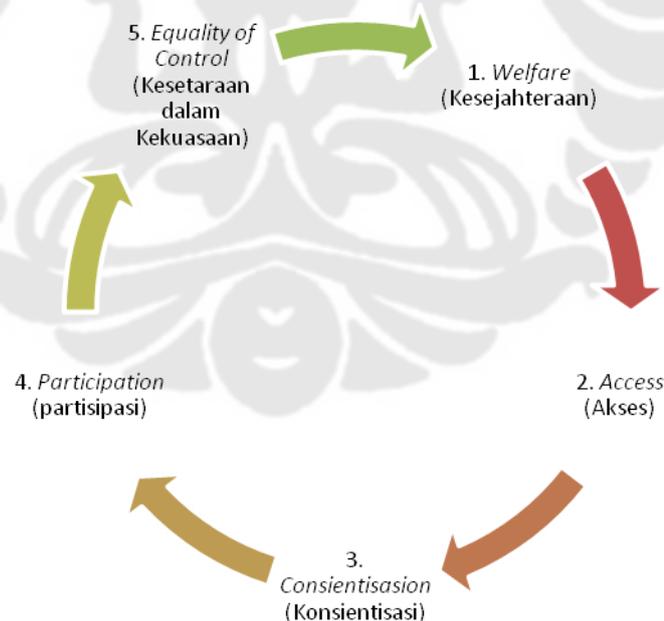
4. *Participation* (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka (Claros dan Zahidi, 2005: 4).

5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

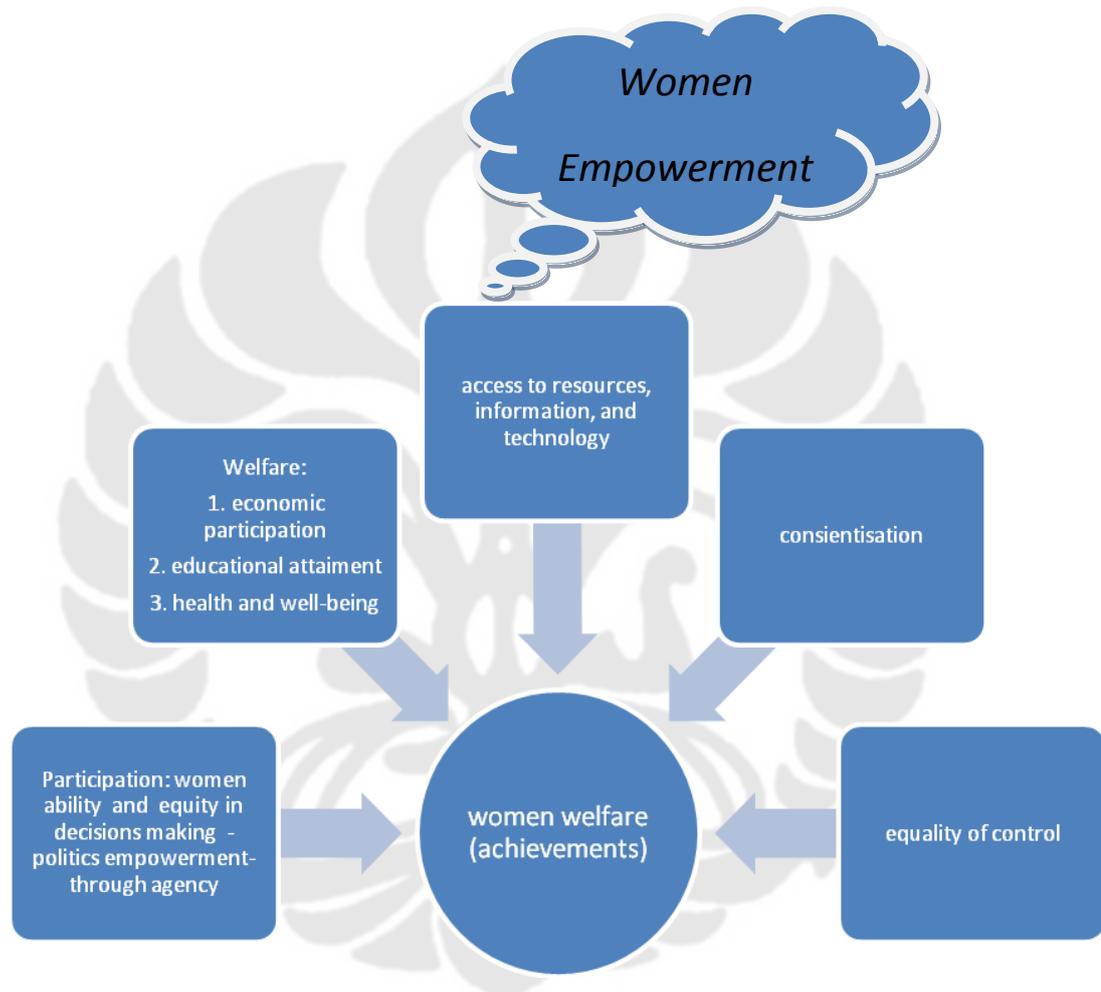
Berikut merupakan siklus yang merepresentasikan unsur-unsur pemberdayaan perempuan.



Gambar 2.3 Kerangka Pemberdayaan Longwe (1989, 1991, dalam Mayoux, 2005a)

Sumber: Telah diolah kembali dari Longwe (1989,1991)

Berdasarkan gambar 2.3 di atas, kerangka pemberdayaan perempuan selalu memasukkan unsur akses, partisipasi, kekuasaan, serta kesejahteraan sebagai indikator keberdayaan perempuan. Ini didasarkan fakta bahwa perempuan secara ekonomi, sosial, dan budaya teralienasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, aspek yang perlu diperhatikan tidak hanya aspek ekonomi semata, melainkan pula aspek politik, sosial, dan budaya.



Gambar 2.4 Konsep Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Telah diolah kembali dari Longwe (1989,1991) dan Claros dan Zahidi (2005)

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, pemberdayaan perempuan merupakan sebuah alat atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan (*women welfare*). Untuk mencapainya dibutuhkan sinergi dari beberapa aspek seperti kualitas sumber daya manusia, akses, kesetaraan dalam kekuasaan, partisipasi, konsientisasi, dan kesejahteraan. Pintu masuk

pemberdayaan dimulai dari peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, di sini peningkatan ekonomi menempati prioritas pertama. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak kegiatan perempuan terutama dalam ranah domestik selalu bersinggungan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan. Dan ironisnya, perempuan justru seringkali mengalami ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Pintu masuk pemberdayaan melalui aspek ekonomi diharapkan dapat mengantarkan perempuan untuk mampu sedikit demi sedikit memperoleh akses terhadap sumber daya lainnya, dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan berangkat dari kepedulian perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Etika kepedulian tersebut baik disadari maupun tidak telah tertanam dalam setiap diri perempuan, yang termanifestasi dalam sebuah spirit, yaitu *motherhood spirit*.

Menurut Mohatta (2007, dalam Lubis 2008: 27), *motherhood* adalah pengorbanan yang diberikan seorang ibu kepada orang lain, yang secara khusus ditujukan kepada anak yang dikandungnya selama 9 bulan dan kemudian ia besarkan dengan penuh kasih sayang.

Sementara Binks (2005) menguraikan bahwa *motherhood* tidak hanya menyangkut hubungan ibu dengan anak, tetapi juga terkait dengan penilaian seorang ibu terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap masyarakat. Artinya, konsep *motherhood* tidak hanya mencakup ranah domestik bagi perempuan, tetapi juga mencakup ranah publik.

Tucker (2006) berpendapat bahwa *motherhood* bukanlah sebuah profesi pekerjaan atau karir. Meskipun tidak dapat diragukan bahwa menjadi ibu sangat menguras tenaga dan mental seorang ibu. Menurut Tucker, *motherhood* lebih diartikan sebagai sebuah hubungan. Ia meyakini bahwa berpikir dan berbicara mengenai *motherhood* akan lebih baik bila dianggap sebagai sebuah hubungan daripada sebagai sistem reproduksi sosial, atau sebuah kewajiban, atau sebuah pekerjaan yang mana pada satu saat kita mencoba memulai untuk menyusun kembali sebuah skenario mengenai *motherhood*, sebuah skenario yang

Dari diagram di atas dapat dipahami juga bahwa memang *motherhood* akan selalu menjadi semangat (*spirit*) dalam semua tingkatan kegiatan perempuan. Pergerakan *motherhood* dari definisi biologis kepada definisi sosial dan hingga akhirnya pada definisi politis, tidak berarti perubahan eksklusif dan meninggalkan konteks definisi sebelumnya. Perubahan tersebut justru lebih bersifat melengkapi makna *motherhood* dengan dimensi yang baru, tanpa harus menghilangkan definisi dasarnya (Lubis, 2008: 99).

Pengertian *motherhood* identik dengan pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ini bukan berarti pengorbanan seorang ibu berhenti pada ranah mikro, yaitu keluarga. Kedermawanan dan keikhlasan seorang ibu seringkali termanifestasi dalam ranah yang lebih luas, yaitu masyarakat. Ini menjadi sebuah kebutuhan *self actualization* seorang ibu untuk mengekspresikan semangat altruismenya kepada masyarakat. Selepas anak-anaknya dewasa atau tidak memerlukan perhatian khusus lagi, kaum ibu kemudian menyalurkan ‘bakat’ altruismenya ke tempat lain. Misalnya ke institusi-institusi sosial seperti pengajian dan arisan atau ke organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita atau bergabung ke LSM, dll (Lubis, 2008).

2.2. *Microfinance*

Microfinance merupakan *entry point* dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, yang memfokuskan pada kesadaran gender. *Microfinance* berperan penting dalam strategi pembangunan karena memiliki hubungan yang langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh CIDA (*Canadian International Development Agency*) (1999: 5) dalam kebijakan gender, perhatian terhadap kesetaraan gender sangat penting dalam praktik pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi. Hasil pembangunan tidak dapat dimaksimalkan dan dipertahankan tanpa perhatian yang besar terhadap perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki.

Program *microfinance* tidak hanya memberikan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk menabung dan memperoleh kredit, namun dapat meraih jutaan

orang di dunia dalam sebuah kelompok yang terorganisir. *Microfinance* memberikan kontribusi bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya dan pemberdayaan yang lebih luas dalam bidang sosial dan politik. Pelayanan *microfinance* dan kelompok yang melibatkan laki-laki memiliki potensi untuk mengubah sikap dan perilaku laki-laki secara signifikan sebagai komponen penting untuk mencapai kesetaraan gender.

2.2.1. Perkembangan *Microfinance*

Microfinance dapat meningkatkan akses terhadap aset produktif (seperti tanah, modal, dan kredit), proses, dan pemasaran bagi perempuan (CIDA, 1999: 11). Dengan memberikan akses terhadap modal dan pelatihan, *microfinance* membantu perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk melawan kemiskinan dan memaksimalkan output ekonomi mereka. Robinson (2001, dalam Katty Skarlatos 2004: 15) mendefinisikan *microfinance* sebagai berikut.

“Microfinance refers to small-scale financial services – primarily credit and savings – provided to people who farm or fish or herd; who operate small enterprises or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or sold; who provide services; who work for wages or commissions; who gain income from renting out small amounts of land, vehicle, draft animal, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local level of developing countries, both rural and urban.”

(*Microfinance* merujuk pada pelayanan keuangan skala kecil –utamanya kredit dan tabungan- yang disediakan bagi petani; yang menjalankan usaha kecil atau usaha mikro di mana barang diproduksi, didaur ulang, diperbaiki, atau dijual; yang menyediakan pelayanan; yang bekerja atas dasar upah atau komisi; yang memperoleh keuntungan dari menyewa sejumlah kecil tanah, peralatan, hewan, atau mesin; dan bagi individu dan kelompok lain pada level lokal di negara berkembang, baik di pedesaan maupun perkotaan.)

Dalam definisi ini, kegiatan *microfinance* berupaya untuk memberikan akses kredit terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah yang seringkali diabaikan oleh bank komersial agar dapat meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kelompok masyarakat ekonomi lemah ini tidak terbatas pada petani, melainkan pula pada pengusaha mikro, bahkan

buruh. Ide utama dari kegiatan ini selain untuk memberikan kredit yang menguntungkan bagi mereka, juga menanamkan budaya menabung.

Sementara menurut Cheston dan Kuhn (2002: 14) *microfinance* memberdayakan perempuan dengan meletakkan modal di tangan mereka dan mengizinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi secara finansial terhadap rumah tangga dan komunitas mereka. Pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, rasa hormat, dan bentuk lainnya dari pemberdayaan demi kemaslahatan perempuan.

Istilah *microfinance* dan *microcredit* seringkali digunakan secara bergantian. Namun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya. *Microcredit* merujuk pada tindakan untuk menyediakan pinjaman. Pada definisi ini, *microcredit* meliputi semua pemberi pinjaman, termasuk partisipan formal (seperti koperasi simpan pinjam yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kredit di daerah pedesaan) dan beberapa partisipan informal (seperti rentenir) (Sengupta and Aubuchon, 2008: 1). *Microfinance*, di sisi lain, merupakan tindakan untuk menyediakan pelayanan keuangan terhadap peminjam, seperti lembaga untuk menabung dan asuransi.

Banyak lembaga *microfinance* memiliki mandat ganda dalam menyediakan pelayanan bagi kaum miskin, yaitu menyediakan pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan keuangan – yang merupakan inti dari kegiatan *microfinance* – dalam hal ini, *microfinance* tidak dilihat sebagai lembaga yang berorientasi pada laba. Namun pada saat yang sama, tingkat pengembalian pinjaman dari kegiatan *microfinance* hingga 95 persen (Sengupta and Aubuchon, 2008:2). Ini menunjukkan bahwa *microfinance* dapat berperan tidak hanya secara ekonomi, melainkan pula secara sosial budaya.

Yunus (2007) berpendapat bahwa sangatlah penting untuk membedakan *microcredit* dengan segala bentuknya dari bentuk kredit yang spesifik seperti Grameen Bank, yang ia sebut sebagai “Grameencredit.” Yunus berpendapat bahwa yang membedakan *grameencredit* adalah tidak didasarkan oleh kontrak yang memaksa dan sistem yang legal, melainkan didasarkan pada *kepercayaan*.

Grameen Bank merupakan salah satu contoh sukses betapa kegiatan *microfinance* memberikan dampak yang positif bagi kaum perempuan Bangladesh, dan memberikan inspirasi bagi dunia untuk mengadopsi kegiatan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan di negara-negara berkembang. Ini menjadi bukti bahwa kaum miskin yang selama ini teralienasi dari akses kredit bank-bank komersial dapat berkembang secara ekonomi, dan yang terpenting, mereka mampu mengembalikan pinjaman, bahkan tingkat pengembaliannya jauh lebih tinggi dibandingkan para investor-investor yang meminjam ke bank. Yunus (2006) mengungkapkan bahwa kaum miskin menjadi miskin bukan karena mereka malas, melainkan mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam kegiatannya, *Grameen Bank* didasarkan pada *The Grameen Bank Lending Innovation Model* (Sengupta and Aubuchon, 2008: 11). Ini merupakan suatu model di mana anggota kelompok mengorganisasikan diri dalam melakukan peminjaman kredit. Unsur kepercayaan, tenggang rasa, dan saling menghormati merupakan prinsip utama dalam model ini.

Microfinance bukanlah sebuah solusi yang bersifat *top-down* bagi upaya pengentasan kemiskinan, namun merupakan pendekatan yang bersifat *bottom-up* yang bertujuan untuk memberdayakan kaum miskin, meningkatkan aspirasi individual dan kemampuan mereka, serta menciptakan sebuah lingkungan yang mana mereka dapat menyadari keuntungan sebenarnya dari pasar ekonomi.

Sejak berkembangnya konsep *Grameen Bank* ke seluruh dunia, *microfinance* menjadi primadona bagi lembaga nirlaba, donor, dan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Perempuan menjadi target utama para donor dan NGO's dengan dasar argumen bahwa kaum perempuan merupakan anggota masyarakat yang paling menderita akibat ideologi patriarki.

2.2.2. *Microfinance* dan Pemberdayaan Perempuan

Linda Mayoux (2001: 111, dalam Cheston dan Kuhn, 2002: 27) mengemukakan bahwa lembaga *microfinance* tidak hanya bekerja pada upaya pemberdayaan perempuan yang berdampak terbatas, namun diperlukan perubahan

terhadap ketidaksetaraan gender dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Di sini Mayoux menyarankan kepada lembaga *microfinance* untuk menyertakan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari *goals, objectives, tindakan, dan desain produk*.

Chen (1997, dalam Mayoux 2005a) mengungkapkan kerangka pemberdayaan perempuan yang digunakan dalam kegiatan *microfinance* di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Material (*Material Change*)

- a. *Income* (pendapatan): meningkatnya pendapatan dan jaminan pendapatan.
- b. *Resources* (sumber daya): meningkatnya akses terhadap, kontrol atas, dan kepemilikan aset dan pendapatan.
- c. *Basic needs* (kebutuhan dasar): meningkatnya kesehatan, kesehatan anak, nutrisi, pendidikan, rumah, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan sumber energi.
- d. *Earning capacity* (kapasitas untuk menghasilkan): meningkatnya kesempatan untuk bekerja ditambah kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan tersebut.

2. Perubahan persepsi (*Perceptual Change*)

- a. *Self-esteem*: berkembangnya persepsi atas diri sendiri, kepentingan, dan nilai.
- b. *Self-confidence* (kepercayaan diri): berkembangnya persepsi atas kemampuan dan kapasitas diri sendiri.
- c. *Vision of future* (visi masa depan): meningkatnya kemampuan untuk berpikir visioner dan merencanakan masa depan.
- d. *Visibility and respect*: meningkatnya pengakuan dan penghormatan terhadap nilai dan kontribusi individual.

3. Perubahan relasional (*relational change*)

- a. *Decision making* (pembuatan keputusan): meningkatnya peran dalam pembuatan keputusan dalam keluarga dan komunitas.

- b. *Bargaining power*: meningkatnya *bargaining power*.
- c. *Participation*: meningkatnya partisipasi dalam kelompok non-keluarga, dalam institusi lokal, dalam pemerintahan lokal, dan dalam proses politik.
- d. *Self-reliance*: mengurangi ketergantungan pada penghubung (orang lain) untuk dapat mengakses sumber daya, pasar, institusi publik dan meningkatnya kemampuan untuk bertindak mandiri.
- e. *Organisational strength*: meningkatnya kekuatan organisasi lokal dan kepemimpinan lokal.

Umumnya, kegiatan *microfinance*, terorganisir dalam kelompok-kelompok dampingan, dan mengandalkan prinsip kepercayaan dan solidaritas sosial dalam pelaksanaannya. Dalam suatu kelompok, anggota kelompok diuji rasa tanggung rasa dan keikhlasannya terhadap anggota kelompok lainnya, dengan menggunakan sistem pinjaman bergilir. Dalam satu kelompok, anggota kelompok bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang mendapat prioritas mendapatkan pinjaman. Prinsip kepercayaan dan solidaritas yang tertanam ini menjadi salah satu penentu berjalan suksesnya kegiatan *microfinance*.

2.3. Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Konsep modal sosial merupakan salah satu konsep yang sangat luas penggunaannya, serta diinterpretasikan secara berbeda oleh para ahli sosial. Dalam sejarahnya, konsep modal sosial ini sudah ada sejak Adam Smith mengkaji konsep ekonomi kapitalistik. Memang mendengar kata modal sosial atau modal sosial, kita tidak bisa memisahkannya dari istilah ekonomi. Makna kapital itu sendiri sangat ekonomis (Lawang, 2004). Oleh karena itu, membicarakan modal sosial berarti membicarakan bagaimana hubungan sosial atau interaksi sosial di antara masyarakat dapat menghasilkan sesuatu yang produktif dan bernilai ekonomis bagi masyarakat tersebut.

2.3.1. Pengertian Modal Sosial

Dalam istilah Adam Smith dan kawan-kawan, modal sosial dikenal sebagai *social contract* –masyarakat sipil- yang berperan besar dalam kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam *social contract* ini meliputi karakteristik jaringan sosial, pola-pola timbal balik, dan kewajiban-kewajiban bersama. Unsur-unsur *social contract* yang dikemukakan oleh Adam Smith dkk itulah yang kemudian menjadi dasar teoritis yang cukup kuat bagi para ahli sosial untuk merumuskan lebih lanjut mengenai konsep modal sosial.

Namun demikian, dalam pengkajian konsep modal sosial, terdapat beberapa ahli, terutama ahli ekonomi yang meragukan bahwa modal sosial memiliki esensi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Portes (1998) dengan elegan mendefinisikan kapital dalam kaitannya dengan bentuk kapital lainnya sebagai berikut.

“Whereas economic capital is in people's bank accounts and human capital is inside their heads, social capital inheres in the structure of their relationships” (Portes 1998: 7).

(Ketika kapital ekonomi berada di dalam rekening bank seseorang dan kapital manusia ada di dalam kepala mereka, maka modal sosial melekat pada struktur dalam hubungan sosial mereka)

Banyak ahli mengidentifikasi bahwa bentuk modal sosial, struktural dan kognitif, diklasifikasikan sebagai kapital karena memerlukan sejumlah investasi atas waktu dan usaha, ini tidak selalu diidentikkan dengan uang (Grootaert 2001; Grootaert and Van Bastelaer 2002).

Studi yang dilakukan oleh beberapa ahli sosial, seperti Coleman, Putnam, Lin, Portes, dan Bordieu semakin memperkaya khasanah konsep modal sosial. Kerap kali, pendapat mereka dijadikan *benchmark* dalam mengupas konsep modal sosial dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian modal sosial secara sistematis dikemukakan oleh Pierre Bordieu (1985: 248, dalam Portes 1999: 3 dan Lin 2001: 3) yaitu *“the aggregate*

of the actual and potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition.” Kumpulan dari sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan penguasaan jaringan yang dapat bertahan lama atas sedikit/banyaknya hubungan yang terinstitusionalisasi atas pengetahuan dan pengenalan. Dalam pengertian ini, modal sosial adalah sumber daya dan terkait dengan hubungan – yaitu sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial.

Fukuyama (1995: 37) mengungkapkan bahwa modal sosial merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Ia mengungkapkan bahwa sebuah komunitas, masyarakat, atau negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Sementara Coleman (1988 dalam Lin 2001:3) menyatakan bahwa modal sosial *“is rooted precisely at the juncture between individuals and their relations; and is contained in the meso-level structure or in social networks.”* (berakar pada individu dan hubungan sosialnya; dan terdapat dalam struktur meso-level atau dalam jaringan sosial). Lebih lanjut, Coleman menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumber daya struktur sosial yang dapat meningkatkan keuntungan bagi individu. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal, melainkan entitas yang beragam dengan karakteristik: (1) terdiri dari beberapa aspek struktur sosial; (2) struktur sosial tersebut mendukung tindakan tertentu yang dilakukan individu yang ada di dalam struktur (1990: 302, dalam Lin, 1999: 34). Pendapat Coleman tersebut kurang lebih memiliki kesamaan dengan Bordieu, yaitu dalam kaitannya dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial.

Lin (2001: 3) berpendapat bahwa modal sosial didefinisikan sebagai sumber daya yang melekat dalam struktur sosial yang dapat diakses atau dimobilisasi dengan tujuan tertentu. (*social capital can be defined as resources embedded in a social structure which are accessed and/or mobilize in purposive actions*).

Modal sosial berasal dari kemampuan aktor untuk mengamankan keuntungan yang diperoleh melalui keanggotaan dalam jaringan sosial atau

struktur sosial lainnya (Portes, 1998: 6). World Bank (1998) mendefinisikan modal sosial dalam pengertian yang lebih luas lagi, yaitu sebagai berikut.

“A society includes the institutions, the relationships, the attitudes, and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development.”

(Sebuah masyarakat yang terdiri dari institusi, hubungan, sikap, dan nilai yang membangun interaksi di antara individu dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial)

Untuk memberikan gambaran mengenai konsep modal sosial, berikut merupakan rangkuman definisi modal sosial menurut beberapa tokoh.

Tabel 2.2
Definisi Modal Sosial

Tokoh	Definisi Modal Sosial
Portes (1998: 7)	<p><i>“Whereas economic capital is in people's bank accounts and human capital is inside their heads, social capital inheres in the structure of their relationships”.</i></p> <p>(Ketika kapital ekonomi berada di dalam rekening bank seseorang dan kapital manusia ada di dalam kepala mereka, maka modal sosial melekat pada struktur dalam hubungan sosial mereka)</p>
Pierre Bordieu (1985: 248, dalam Portes 1999: 3 dan Lin 2001: 3)	<p><i>“the aggregate of the actual and potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition.”</i></p> <p>(Kumpulan dari sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan penguasaan jaringan yang dapat bertahan lama atas sedikit/banyaknya hubungan yang terinstitusionalisasi atas pengetahuan dan pengenalan)</p>
Coleman (1988 dalam Lin 2001:3)	<p><i>“is rooted precisely at the juncture between individuals and their relations; and is contained in the meso-level structure or in social networks.”</i> (berakar pada individu dan hubungan sosialnya; dan terdapat dalam struktur meso-level atau dalam jaringan sosial).</p>

Fukuyama (1995: 37)	Modal sosial merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya.
Lin (2001: 3)	<p><i>“social capital can be defined as resources embedded in a social structure which are accessed and/or mobilize in purposive actions”</i></p> <p>(modal sosial didefinisikan sebagai sumber daya yang melekat dalam struktur sosial yang dapat diakses atau dimobilisasi dengan tujuan tertentu)</p>
World Bank (1998)	<p><i>“A society includes the institutions, the relationships, the attitudes, and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development.”</i></p> <p>(Sebuah masyarakat yang terdiri dari institusi, hubungan, sikap, dan nilai yang membangun interaksi di antara individu dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial)</p>

Dari beberapa pengertian para ahli sosial di atas, dapat kita simpulkan bahwa modal sosial memang bersifat abstrak (*intangible*). Ia tidak dapat dilihat, didengar, bahkan diraba oleh manusia. Namun demikian, modal sosial memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia yang termanifestasi dalam prinsip kepercayaan dan solidaritas sosial. Kerap kali para ahli mengungkapkan, karena sifatnya yang *tangible* maka modal sosial melekat pada struktur sosial masyarakat. Modal sosial dianggap sebagai perekat (*glue*) yang merekatkan anggota-anggota masyarakat (Serageldin, 1996 dalam Grootaert 1999: 6).

Dengan mengacu pada beberapa pemikiran di atas, maka yang dimaksud dengan modal sosial dalam penelitian ini adalah solidaritas, informasi, kepercayaan, dan norma-norma, hubungan timbal balik yang melekat dalam suatu jaringan sosial (*transactional* dan *relational*) yang berfungsi untuk memudahkan kerja sama dan bertujuan untuk menciptakan tindakan bersama yang saling menguntungkan.

Untuk memperoleh modal sosial, seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain ini bukan dirinya sendiri, yang merupakan sumber

aktual demi keuntungannya (Portes, 1998:7). Sebagai sebuah atribut bagi struktur sosial yang melekat pada masyarakat, modal sosial bukanlah sebuah barang privat dari orang-orang yang memperoleh keuntungan darinya (Coleman, 1990). Modal sosial hanya dapat muncul apabila digunakan dan dibagi bersama oleh anggota masyarakat.

Di sini kita dapat melihat bahwa modal sosial apabila dikelola dengan baik, yaitu melalui *shared values* (adanya nilai yang dibagi), pengorganisasian peran-peran yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal, kepercayaan, dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yaitu manfaat ekonomi dan sosial.

2.3.2. Unsur-Unsur Modal Sosial

Modal sosial menunjuk pada kemampuan suatu kelompok dalam masyarakat untuk dapat saling bekerja sama dan membentuk jaringan kerja yang diwarnai dengan pola interaksi yang saling menguntungkan, dan dibangun atas dasar kepercayaan antara anggota kelompok. Kepercayaan ini kemudian ditopang oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang kuat. Pada akhirnya, jaringan, kepercayaan, dan norma yang kuat ditambah dengan tindakan proaktif setiap anggota kelompok akan mendukung tercapainya tujuan bersama. Berikut merupakan penjabaran dari unsur-unsur modal sosial.

2.3.2.1. Kepercayaan

Fukuyama (1995: 36-37) mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang tumbuh bersama di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Sementara menurut Lawang (2004: 46) kepercayaan didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau dua pihak melalui interaksi sosial. Menurutnya, inti kepercayaan antarmanusia didasari oleh tiga hal yang saling terkait (a) hubungan sosial antara dua orang atau lebih; (b) harapan yang terkandung dalam

hubungan tersebut; (c) interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Kepercayaan lahir dari sebuah proses yang panjang, yang dibangun berdasarkan pengalaman, bersifat akumulatif, teruji oleh harapan, penghargaan, dan keuntungan yang terkandung dalam kepercayaan itu.

2.3.2.2. Jaringan

Modal sosial tidak hanya dibangun oleh satu orang, tetapi oleh kemampuan suatu kelompok untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Kuat lemahnya modal sosial sangat tergantung oleh kapasitas yang dimiliki oleh suatu kelompok untuk membangun sejumlah asosiasi dan jaringan yang solid. Jaringan-jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama.

Dalam menjalin interaksi dengan sesamanya, masyarakat memiliki karakteristik hubungan yang didasarkan atas prinsip kesamaan, kebebasan, kesukarelaan, dan keadaban. Kemampuan anggota-anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok (Hasbullah, 2006 : 9). Jaringan merupakan sumber pengetahuan yang menjadi dasar dalam pembentukan kepercayaan. Lawang (2004: 63) mengungkapkan bahwa jaringan menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengatasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

2.3.2.3. Norma

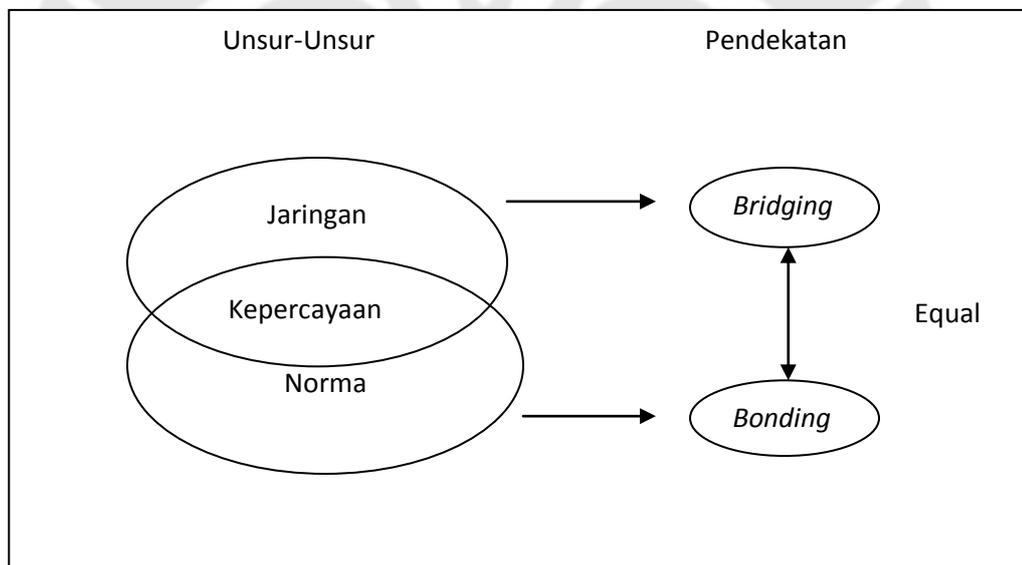
Norma terdiri dari pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma ini akan sangat berperan dalam mengontrol setiap bentuk perilaku yang muncul dalam masyarakat. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung kerja sama

(Fukuyama, 1995). Lawang (2004: 70) mengungkapkan bahwa norma memiliki sifat berikut.

- a. Norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan
- b. Norma bersifat resiprokal, artinya norma menyangkut hak dan kewajiban yang berperan dalam upaya memperoleh keuntungan dari suatu kegiatan tertentu.
- c. Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata akan memunculkan norma keadilan.

Norma-norma dapat menjadi pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Konfigurasi norma yang tumbuh di tengah masyarakat juga akan menentukan apakah norma tersebut akan memperkuat kerekatan hubungan antarindividu dan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat tersebut (Hasbullah, 2006).

Secara sederhana, unsur modal sosial dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.6 Unsur-Unsur Modal Sosial

Sumber: (Lubis, 2009: 5)

Berdasarkan gambar di atas, modal sosial yang hanya berfungsi sebagai *bonding* saja tentu akan menciptakan eksklusivitas suatu komunitas sehingga menutup jaringan dan terhadap sumber-sumber yang ada di luar komunitas.

Akibatnya yang terbentuk adalah komunitas yang eksklusif dan primordialis. Sementara jika modal sosial sebagai *bridging* saja, maka ikatan/norma diantara para anggota komunitas akan sangat lemah yang akhirnya memunculkan individualitas dan sikap oportunistik. Oleh karena itu agar modal sosial dapat berfungsi optimal, maka harus tercipta keseimbangan antara *bridging* dan *bonding* (Lubis, 2009: 5).

2.3.3. Modal Sosial Pada Level Individu dan Kelompok

Coleman (dalam Serageldin & Dasgupta, 2000: 20-27) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang dapat mengangkat modal sosial tersebut menjadi sesuatu yang produktif. Kondisi-kondisi tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Hubungan sosial yang terjalin harus memiliki:
 - a. Kewajiban dan ekspektasi yang didasarkan pada tingkat kepercayaan pada suatu lingkungan. Munculnya kewajiban di antara individu-individu memperkuat ikatan di antara keduanya. Kewajiban tersebut saling memberikan kontribusi dan dilandasi oleh rasa saling percaya. Selain itu pula, orang-orang tersebut mempunyai harapan tertentu dengan sesamanya.
 - b. Saluran informasi. Sebuah modal sosial dapat tumbuh dan berkembang apabila terdapat informasi-informasi potensial yang dapat mengembangkan aksi bersama dalam struktur masyarakat.
 - c. Norma-norma dan sanksi yang efektif. Dengan adanya norma dan sanksi yang efektif, akan tercipta rasa aman dalam masyarakat, sehingga setiap anggotanya dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.
2. Struktur sosial yang ada memiliki:
 - a. Organisasi sosial yang tepat. Organisasi yang ada dalam struktur dapat membantu anggota masyarakat memecahkan masalah atau konflik yang terjadi. Uphoff (dalam Dasgupta & Serageldin, 2000: 222) juga menambahkan bahwa organisasi sosial diharapkan dapat membuat

keputusan bersama, melakukan komunikasi, memobilisasi dan mengatur sumber daya.

- b. Jaringan sosial yang tertutup. Dalam menjalin hubungan sosial di antara individu, harus membentuk suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lainnya, dan tidak berhenti pada hubungan pada dua individu tertentu.

Lebih lanjut Coleman (dalam Dasgupta & Serageldin, 2000: 174-179) mengungkapkan bahwa modal sosial berasal dari individu yang membentuk jaringan dengan orang lain di mana secara sadar maupun tidak telah membentuk aset untuk dirinya sendiri. Berbeda jauh dengan modal yang bersifat material, modal sosial justru semakin bertambah bobotnya apabila semakin intensif didayagunakan, karena itu penggunaan modal sosial akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suatu kegiatan.

Menurut Lin, individu melakukan interaksi dan membangun jaringan untuk menghasilkan keuntungan. Terdapat tiga alasan mengapa sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dapat meningkatkan hasil yang diharapkan. Pertama, ini memfasilitasi aliran informasi. Dalam situasi pasar tidak sempurna, ikatan sosial ditempatkan pada lokasi strategis dan/atau posisi hierarkial (dan artinya informasi yang lebih baik atas pasar dan permintaan) dapat membantu individu memperoleh informasi mengenai kesempatan dan pilihan. Kedua, ikatan sosial ini dapat mempengaruhi agen dalam sebuah organisasi yang berperan dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, sumber daya ikatan sosial, dan hubungannya bagi individu dipahami oleh organisasi sebagai sertifikasi atas kepercayaan sosial individu, beberapa di antaranya mencerminkan aksesibilitas individu bagi sumber daya melalui jaringan dan hubungan sosial –modal sosial yang dimilikinya. Terakhir, hubungan sosial diharapkan dapat mempengaruhi identitas dan pengenalan.

Dalam kaitannya dengan level interaksi dalam hubungan antarmanusia yang bertujuan salah satu di antaranya adalah memperoleh keuntungan, modal sosial dapat bekerja pada dua level, yaitu level individu dan level kelompok. Pada level individu, modal sosial berperan bagi individu untuk dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dengan tujuan

memeroleh keuntungan. Lebih lanjut, menurut Lin, inti dari perspektif ini adalah bagaimana individu berinvestasi dalam hubungan sosial; bagaimana individu mampu menangkap sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan.

Sementara pada level kelompok, penekanannya terletak pada bagaimana kelompok tertentu mengembangkan dan mempertahankan sedikit/banyak modal sosial yang dimiliki sebagai aset bersama; dan bagaimana aset bersama tersebut dapat meningkatkan kesempatan hidup anggotanya. Ahli yang mendasarkan teorinya pada perspektif ini di antaranya adalah Bordieu, Coleman, dan Putnam (dalam Lin, 1999: 32). Bordieu dan Coleman sepakat bahwa modal sosial melekat pada struktur hubungan antarindividu.

Semua masyarakat dibangun dari kelompok masyarakat, dan kelompok ini menentukan sikap, kepercayaan, identitas, nilai sebagaimana akses terhadap sumber daya dan kesempatan, dan yang terpenting adalah akses terhadap kekuasaan. Karena kebanyakan masyarakat tidak homogen, melainkan terpisah oleh kelas, kasta, agama, dan etnisitas, maka dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, terdapat perbedaan dalam setiap kelompok. Ini dapat berupa modal sosial yang tinggi dalam sebuah kelompok (*bonding social capital*) yang membantu anggota kelompok, namun dapat juga dipisahkan dari kelompok lain (*bridging social capital*) (Narayan, 1999:1).

Dalam istilah Lin (2000), *bonding social capital* dan *bridging social capital* diistilahkan sebagai *lesser or denser social network*. Istilah ini didasarkan pada pandangan bahwa kerekatan jaringan sosial dalam masyarakat akan mempengaruhi nilai ekonomis (*benefit*) masyarakat tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa modal sosial memiliki esensi ekonomi di dalamnya.

Kerekatan jaringan sosial dalam masyarakat, menurut Lin akan menciptakan solidaritas sosial yang kuat, dan ini akan semakin memperkuat fundamen suatu kelompok masyarakat yang sudah terbentuk. Di sini kita dapat melihat bahwa esensi sosial dari modal sosial begitu jelas terlihat. Individu-individu berafiliasi dalam sebuah kelompok karena hakikat dasar manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam

sebuah kelompok akan terbentuk norma-norma, kepercayaan, dan solidaritas sosial, sehingga anggotanya akan berusaha beradaptasi dan konform terhadap prinsip-prinsip yang dianut dalam kelompok.

Namun demikian menurut Lin, solidaritas kelompok tidaklah cukup untuk memaksimalkan modal sosial untuk memberikan benefit bagi anggotanya. Ia berpendapat bahwa untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, maka diperlukan distribusi aliran informasi (jembatan) yang merata dalam suatu kelompok masyarakat. Jembatan ini menghubungkan anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya guna menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Solidaritas dalam kelompok memang penting, namun jika terfokus pada hal tersebut, maka cenderung akan menimbulkan eksklusivitas kelompok. Berbeda halnya apabila kelompok masyarakat memiliki jaringan sosial yang luas. Jaringan tersebut akan memberikan aliran-aliran informasi yang berguna bagi peningkatan produktivitas ekonomi kelompok masyarakat.

Coleman (1990) mengemukakan bahwa modal sosial dapat membangkitkan inisiatif individu-individu untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan, maka modal sosial tersebut akan menciptakan sebuah *spirit motherhood*.

Dalam kaitannya dengan hubungan antarindividu, modal sosial dapat dilihat setara dengan modal manusia dengan asumsi bahwa investasi tertentu yang dibuat oleh individu memberikan keuntungan yang diharapkan bagi individu (Lin, 1999: 32). Keuntungan individu yang terkumpul juga berdampak pada meningkatnya keuntungan bagi kelompok.

Konsep mengenai modal manusia menurut Woodhall mengacu pada fakta bahwa individu menginvestasikan dirinya sendiri melalui pendidikan, pelatihan, maupun aktivitas lain yang akan menaikkan pendapatan mereka di masa mendatang dengan meningkatkan nafkah seumur hidup mereka (Woodhall, dalam Halsey 2001: 219).

Modal manusia menurut Lawang (2004: 13) menunjuk pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman

dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.

Modal manusia dan modal sosial pada dasarnya saling berhubungan, di mana faktor yang menghubungkan kedua modal ini adalah manusia. Jika suatu kepercayaan dapat muncul pada jumlah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka salah satu sumber pengetahuan dan pengalaman bagi seseorang diperoleh melalui pendidikan dan keterampilan (Lawang, 2004: 77). Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berpeluang untuk dipercayai atau dicari (membuka jaringan). Berikut merupakan kerangka yang dikembangkan untuk melihat hubungan antara modal manusia dan modal sosial (Schuller, dalam Lawang 2004: 78).

Tabel 2.3
Hubungan antara modal manusia dan modal sosial

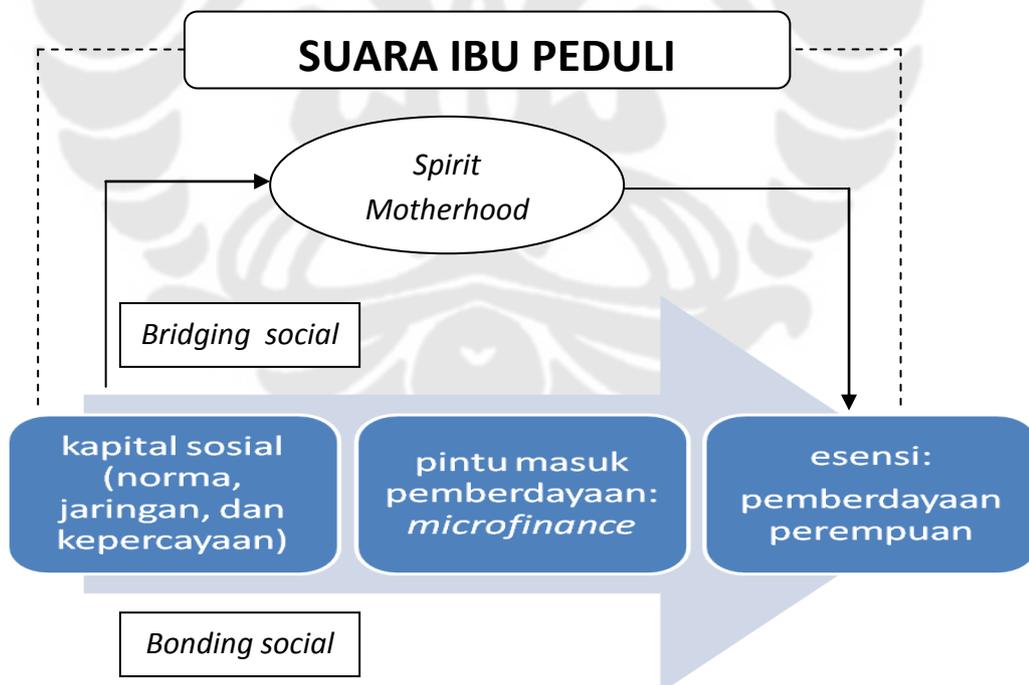
Kerangka Konsep	Hubungan Antara	
	Modal Manusia	Modal Sosial
Fokus	Orang per orang	Hubungan antar orang dan jaringan yang dibentuk
Input/ukuran	Diukur dengan kualifikasi tingkat kemampuan yang diperoleh. Ukuran ini relatif tepat.	Agak sulit mengukurnya. Diukur secara umum menurut nilai, sikap, partisipasi dalam kehidupan sosial atau jaringan.
Outcome	Diukur dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas	Langsung dihubungkan dengan kinerja ekonomik di berbagai tingkatan: negara, regional, dan komunitas
Model	Linear: investasi uang dan waktu menghasilkan keuntungan ekonomi	Kurang linear: hasilnya sulit diidentifikasi dan kapan

Sumber: Schuller (dalam Lawang, 2004: 78)

2.3.4. Peranan Modal Sosial dalam Pemberdayaan

Dalam konteks pemberdayaan, modal sosial berperan penting dalam beberapa aspek berikut (dalam <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2.pdf>).

- a. Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik dan meyakini bahwa hubungan sosial (*social relationships*) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja. Sebaliknya, pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakatnya.
- b. Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual.
- c. Modal sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat. Untuk itu dibutuhkan dukungan sumber daya tertentu.
- d. Agar tercipta hubungan-hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.



Gambar 2.7 Alur Pemikiran

Berdasarkan skema di atas, Suara Ibu Peduli melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan terhadap kaum perempuan marjinal dengan kegiatan simpan pinjam (*microfinance*) sebagai pintu masuk pemberdayaan. Dalam prosesnya, unsur-unsur modal sosial seperti norma, jaringan, dan kepercayaan dikembangkan guna mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan. Nilai-nilai yang melekat dalam Suara Ibu Peduli seperti kultur kepedulian dan *motherhood spirit* menjadi unsur lainnya yang mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan.

